IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perum Bulog Divre Lampung

1. Sejarah Perum Bulog

Perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas.

Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. Pada tahun 1995, keluar Keputusan Presiden Nomor 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok,

fungsi serta peran Bulog. Oleh karena itu, tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan.

Tugas pokok Bulog sesuai Keputusan Presiden (Keppres) tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres Nomor 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres Nomor 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti Keppres Nomor 39 tahun 1968.

Selanjutnya melalui Keppres Nomor 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam *Letter of Intent (LoI).* Dalam Keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres Nomor 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya.

Pada Keppres Nomor 29 Tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres Nomor 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres Nomor 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres Nomor 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Wilayah kerja Bulog tersebar di seluruh Indonesia dengan total 26 kantor Divisi Regional (Divre) di ibukota propinsi. Divre-divre ini membawahi 130 subdivre/kansilog yang tersebar di hampir semua kabupaten/kota. Gudang-gudang Bulog sebanyak 1.596 unit atau dengan total kapasitas 4,02 juta ton beras, tersebar sampai wilayah-wilayah terpencil dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas publik di bidang pangan yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu dioperasikan juga 131 Unit Pengolahan Gabah-Beras (UPGB) di wilayah-wilayah surplus padi untuk mendukung kegiatan komersial korporasi Bulog. Dengan total 5.052 pegawai dan sistem IT *online* di setiap unit kerja

menjadikan Bulog sebagai lembaga pangan yang profesional dan siap diandalkan dalam memantapkan ketahanan pangan.

Gambar 4.1 Peta Sebaran Wilayah Kerja Perum Bulog di Seluruh Indonesia

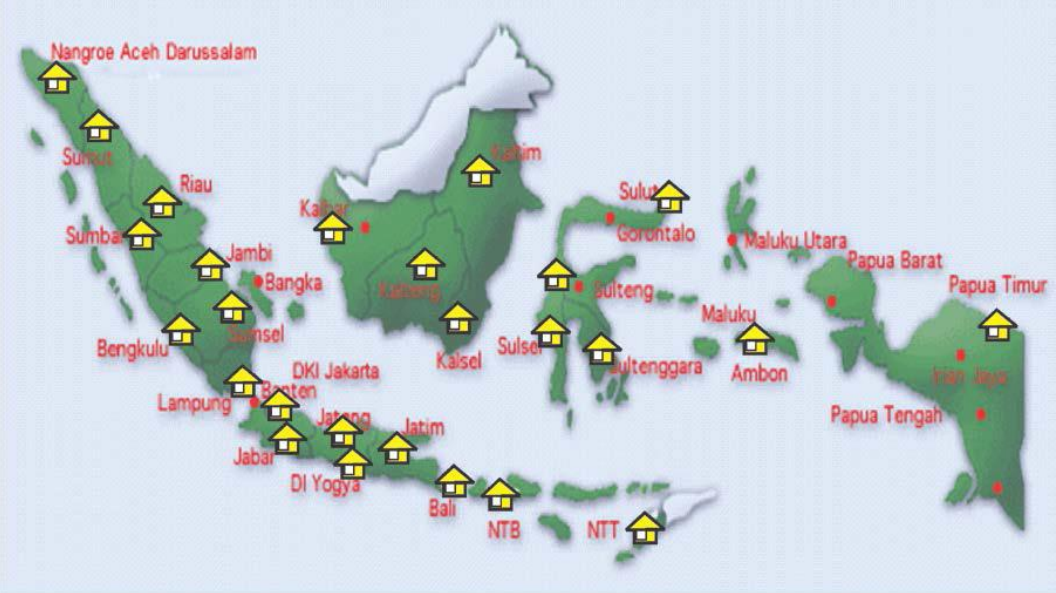

Sumber: *www.bulog.co.id* diakses tanggal 25 Februari 2013

2. Peran dan Fungsi Perum Bulog Divre Lampung

Perum Bulog Divre Lampung adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, dan merupakan salah satu wilayah kerja Bulog yang terletak di Provinsi Lampung. Bulog Divre Lampung membawahi dua subdivre dan satu kansilog yang tersebar di beberapa kabupaten. Selain itu, Bulog Divre Lampung memiliki tiga unit gudang, yakni Gudang Soekarno-Hatta, Gudang Sukaraja, dan Gudang Tanggamus. Bulog Divre Lampung juga mengoperasikan dua Unit Pengolahan Gabah-Beras (UPGB) untuk menjalankan tugas komersialnya. Sebanyak 111 pegawai dan sistem IT online

dikoordinasikan untuk menjalankan tugas yang diemban oleh Bulog Divre Lampung.

Bulog Divre Lampung mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas yang dimilikinya kepada Perum Bulog yang berkedudukan di pusat. Sebagai sebuah Divisi Regional, Bulog Divre Lampung memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengelola asset untuk menjalankan bisnis secara benar sesuai arah perusahaaan.
b. Menyepakati target kinerja dengan Direksi
c. Menjalankan kebijakan dan prosedur baku yang ditetapkan oleh Kantor Pusat.
d. Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi Pemilik Modal, Calon Penanam Modal dan pemangku kepentingan.

Sebagai sebuah perusahaan umum milik negara, Bulog Divre Lampung memiliki fungsi pelayanan publik dan juga fungsi komersial yang serupa dengan Perum Bulog yang berkedudukan di pusat. Fungsi pelayanan publik yang dijalankan Perum Bulog yaitu:

a. Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah dan menjaga pendapatan petani produsen,
b. Menyediakan dan menyebarkan stok yang merata dan cukup ke seluruh Indonesia,

c. Menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta
d. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan.

Selain fungsi pelayanan publik, Bulog juga memiliki fungsi komersial seperti:

a. Mendukung kegiatan PSO,
b. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan
c. Meningkatkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan perusahaan.

3. Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugasnya, Bulog Divre Lampung memiliki visi dan misi yang menjadi acuannya dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik. Visi dan misi Bulog Divre Lampung, yaitu:

Visi: Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Visi diatas mencerminkan misi yang diamanatkan oleh Pemerintah, khususnya berkaitan dengan keberhasilan dan ketahanan pangan nasional. Posisi Bulog sebagai lembaga pangan yang handal mencakup pemantapan ketahanan pangan nasional, profesional dan kompetitif dalam bidang usaha pangan serta senantiasa memiliki rasa dan nilai kepekaan atas tanggung jawabnya bagi kepentingan masyarakat serta taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam melaksanakan bisnis.

Misi:

a. Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau.
b. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsip-prinsip GCG di bidang pangan.

Misi Perum Bulog disusun dengan berfokus pada kompetensi dan tujuan/makna utama (*one common purpose*) dari keberadaan Perum Bulog yang diharapkan dapat mencerminkan keyakinan atau nilai organisasi serta memberikan makna pada setiap karyawan Bulog sehingga mampu menyatukan organisasi dan membangun komitmen bersama.

4. Struktur Organisasi Perum Bulog Divre Lampung

Berikut merupakan struktur organisasi Perum Bulog Divre Lampung:

a. Kepala Divisi Regional
b. Bidang Pelayanan Publik, membawahi
    1) Seksi Pengadaan
    2) Seksi Penyaluran
    3) Seksi Persediaan dan Angkutan
    4) Seksi Perawatan Kualitas
    5) Seksi Harga dan Pasar
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha
    1) Seksi Jasa
    2) Seksi Industri dan Perdagangan
    3) Seksi Informasi dan Teknologi

4) UB Jastasma

5) UB Jasang

d. Bidang Administrasi dan Keuangan

1) Seksi SDM dan Hukum

2) Seksi Keuangan

3) Seksi TU dan Umum

4) Seksi Hubungan Masyarakat

e. Subdivre Lampung Tengah

f. Subdivre Lampung Utara

g. Kansilog Lampung Selatan

1) Gudang Simpur

2) Gudang Palas

h. Gudang Tanggamus

i. Gudang Soekarno Hatta

j. Gudang Sukaraja

k. UPGB Soekarno Hatta I

l. UPGB Soekarno Hatta II

m. UPGB Tanggamus

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Perum Bulog Divisi Regional Lampung
(Per 01 Oktober 2013)

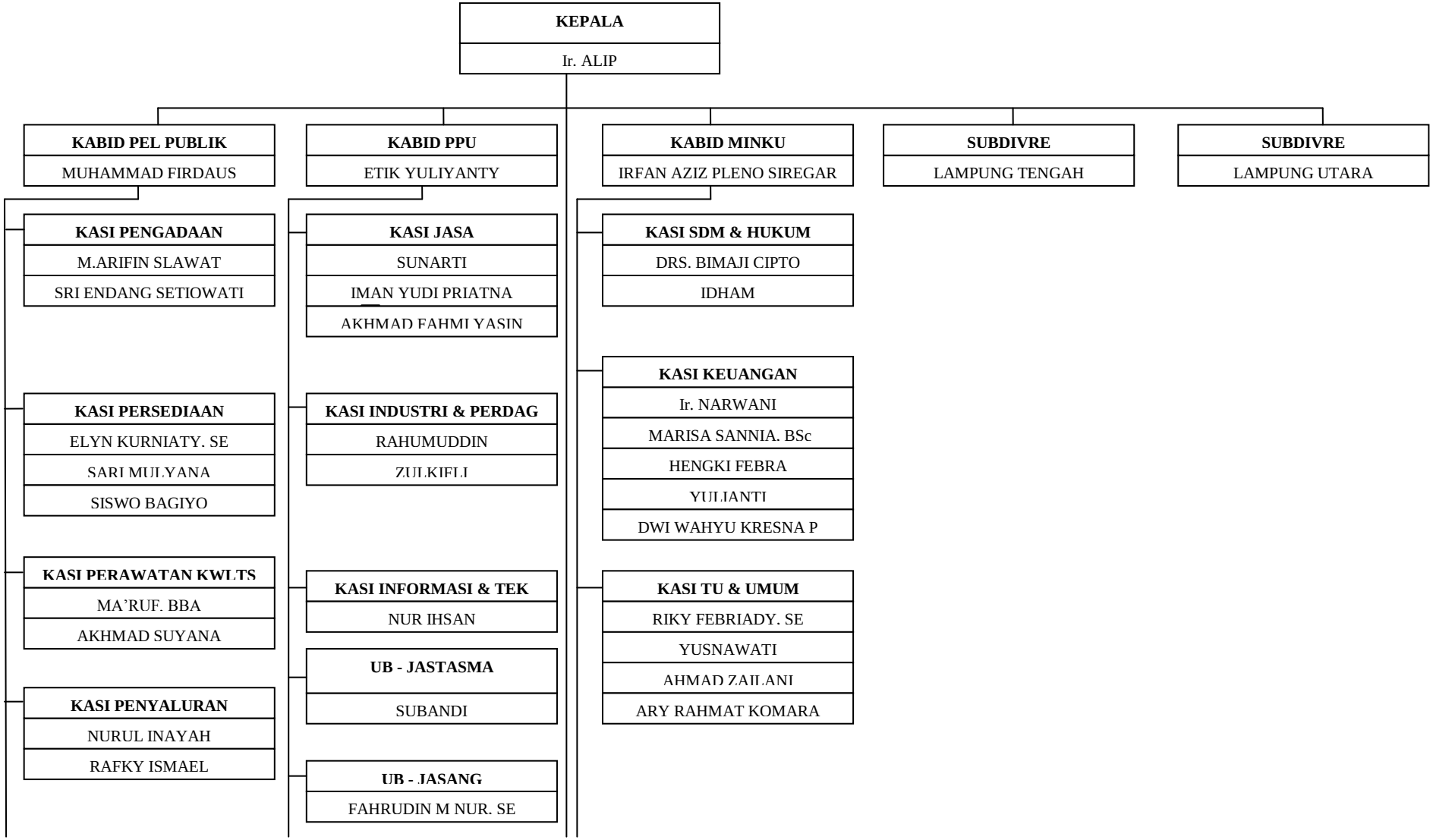

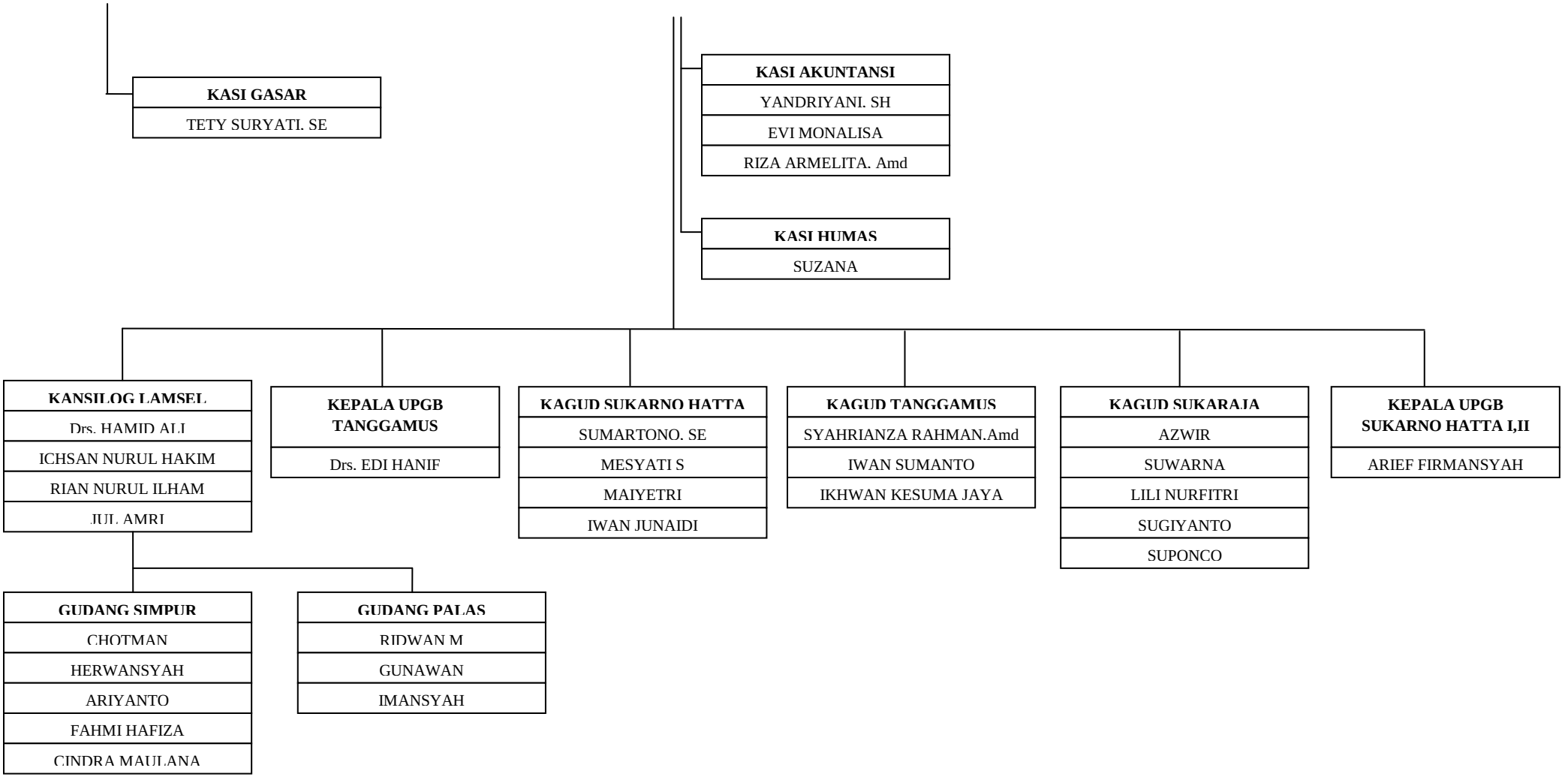
KASI GASAR
TETY SURYATI. SE
KASI AKUNTANSI
YANDRIYANI. SH
EVI MONALISA
RIZA ARMELITA. Amd
KASI HUMAS
SUZANA
KANSILOG LAMSEL
Drs. HAMID ALI
ICHSAN NURUL HAKIM
RIAN NURUL ILHAM
JUL AMRI
KEPALA UPGB TANGGAMUS
Drs. EDI HANIF
KAGUD SUKARNO HATTA
SUMARTONO. SE
MESYATI S
MAIYETRI
IWAN JUNAIDI
KAGUD TANGGAMUS
SYAHRIANZA RAHMAN.Amd
IWAN SUMANTO
IKHWAN KESUMA JAYA
KAGUD SUKARAJA
AZWIR
SUWARNA
LILI NURFITRI
SUGIYANTO
SUPONCO
KEPALA UPGB SUKARNO HATTA I,II
ARIEF FIRMANSYAH
GUDANG SIMPUR
CHOTMAN
HERWANSYAH
ARIYANTO
FAHMI HAFIZA
CINDRA MAULANA
GUDANG PALAS
RIDWAN M
GUNAWAN
IMANSYAH